



KR-Antara/Anis Efizudin

TANAH LONGSOR DI TEMANGGUNG: Warga menyaksikan lokasi bencana tanah longsor Dusun Seneng, Pateken, Wonobojo, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024). Tanah longsor sepanjang 60 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 15 meter itu memutus jalan antardesa dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

DIDUGA LIBATKAN PEJABAT KKP DAN KOMINFO

KPK Usut Suap dari Perusahaan Jerman

JAKARTA (KR) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango memerintahkan jajaran lembaga antirasuah untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan perusahaan perangkat lunak asal Jerman SAP menyuap sejumlah pejabat di Indonesia. Nawawi meminta publik bersabar hingga pihaknya mendapat informasi lengkap soal kabar dugaan suap tersebut.

"(Soal) SAP, sudah saya tanya-kan langsung kepada direktur penyelidikan dan juga direktur PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat) untuk segera melakukan semacam pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) terhadap itu," kata Nawawi di Jakarta, Rabu (17/1).

Untuk diketahui, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Rabu (10/1), merilis informasi telah menjatuhkan denda senilai 220 juta dolar AS kepada perusahaan

perangkat lunak asal Jerman, SAP SE atas pelanggaran Undang-Undang Praktik Korupsi di Luar Negeri (Foreign Corrupt Practices Act). Denda tersebut dijatuhkan kepada SAP SE terkait perkara suap kepada pejabat pemerintah di Afrika Selatan dan Indonesia.

Salah satu pihak di Pemerintah Indonesia yang diduga menerima suap dari perusahaan asal Jerman itu ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terkait hal itu, Menteri Kelautan dan Per-

ikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan terkait dugaan suap oleh SAP yang menyeret KKP.

Trenggono mengaku baru mengetahui kabar mengenai perkara suap yang terjadi pada tahun 2015-2018 itu. Saat ini, pihaknya sedang mengidentifikasi jejak proyek maupun aplikasi dari SAP yang berkaitan dengan kasus tersebut. "Saya juga baru tahu, ya, tetapi saya lagi identifikasi di dalam aplikasinya apa, aplikasinya belum tahu. Itu kan masa lalu, di periode 2015 sampai 2018. Harusnya ada jejaknya. Artinya, aplikasinya ada. Itu kan perusahaan aplikasi, tetapi kami kok belum ada. Jadi, itu salah satu yang lagi kami cari," bebernya.

Kemudian, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Kominfo) juga diduga menerima suap dari SAP. Bakti Kominfo menyatakan berkomitmen mendukung penuh negakan hukum atas kasus suap dari salah satu perusahaan perangkat lunak asing asal Jerman, yaitu SAP.

Bakti Kominfo secara tegas akan melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajaran-nya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuaan tersebut. "Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi," demikian pernyataan resmi Bakti Kominfo. **(Ant/Has)-f**

MESKI DITETAPKAN TERSANGKA Pemeran Film Porno Belum Ditahan

JAKARTA (KR) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan, pemeran film porno belum perlu dilakukan penahanan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan belum diperlukan selama proses penyidikan masih dilakuk-

kan. Menurut Ade Safri, alasan tidak melakukan penahanan terhadap para pemeran karena pihaknya ingin fokus dalam penanganan kasus tersebut. "Sementara ini kita fokus dalam penyidikan penanganan perkara a quo," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (17/1).

Sebagai catatan sebanyak 10 dari 11 tersang-

ka yang memainkan film porno di Jakarta Selatan telah diminta keterangan. Senin (8/1) ada sembilan pemeran yang memenuhi panggilan yaitu Anisa Tasya Amelia alias Meli 3GP, Virly Virginia alias VV, Putri Lestari alias Jessica, NL alias Caca Novita (CN), Zafira Sun alias ZS, Arella Bellus alias AB, MS dan SNA alias Ici Azizah dan pemeran pria yaitu AFL.

Kemudian pada Senin (15/1) ada satu tersangka pria yakni Bima Prawira alias BP. Sementara satu tersangka perempuan bernama Francisca Candra Novita Sari alias Siskaeer belum memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

(Ant/Has)-d

PENYIDIK PENUHI PETUNJUK KEJATI DKI

Pengembalian Berkas Firli Bahuri dalam Proses

JAKARTA (KR) - Pengembalian berkas kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri ke Kejati DKI sedang berproses. Tidak ada kendala dalam memenuhi berkas tersebut dan polisi akan secepatnya merampungkan petunjuk P19 dari JPU Kejati DKI Jakarta.

"Kami update, bahwa pada minggu ini tim penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri sedang memenuhi beberapa materi petunjuk P19 dari kantor Kejati DKI Jakarta yang menanganikan perkara a quo," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/1).

Ade Safri menjelaskan, untuk memenuhi materi tersebut pada minggu ini ada

pemeriksaan dari sejumlah saksi. "Jadi di minggu ini ada beberapa agenda pemeriksaan saksi yang harus kami lakukan termasuk ada konfrontasi dan juga telah dijadwalkan. Salah satunya pemeran telah dilayangkan dan diterima surat panggilan terhadap tersangka FB untuk jadwal pemeriksaan pada Jumat (19/1) pukul 09.00 di ruang riksa Ditipidkor Bareskrim Polri, lantai 6," jelasnya.

Kejaksanaan Tinggi DKI Jakarta meminta Polda Metro Jaya segera mengirim kembali berkas kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) karena mendekati tenggat waktu pengembalian berkas, yakni Kamis (11/1). "Betul! Tenggat waktu sampai Kamis (11/1)," kata Plh Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Herlangga Wisnu.

(Ant/Has)-d

DIGELAR 3 HARI DI YOGYAKARTA

Lawatari Berupaya Berjejaring dengan Komunitas di Daerah

YOGYA (KR)-Rangkaian kegiatan tari kontemporer bertajuk Lawatari digelar Indonesian Dance Festival (IDF) selama tiga hari, Jumat hingga Minggu (19-21/1/2024) dipusatkan di Studio Banjarmili, Dusun Kradenan, Banyuraden, Sleman. Pada event di Yogyakarta ini IDF bekerja sama dengan Mila Art Dance Laboratory (MAD Lab), Paradance, dan Studio Banjarmili.

Mila Rosinta dari MAD Lab menyebutkan, Lawatari berawal dari kata 'lawat' dan 'tari' yang berarti IDF mengunjungi tari di berbagai daerah.

"Lawatari merupakan festival tari kontemporer Indonesia yang sudah berjalan 30 tahun yang terus berupaya berjejaring dengan komunitas-komunitas di daerah," kata Mila di Studio Banjarmili, Rabu (17/1/2024).

Sementara Nia Agustina dari Paradance mengatakan, IDF mencoba memahami konteks di masing-masing daerah yang dikunjungi. Program digagas untuk tetap terhubung dengan pegiat di berbagai sentra seni pertunjukan Indonesia melalui pentas karya. Dalam rangkaian ini, Lawatari telah digelar Makassar (September 2023) dan Padang Panjang (Desember 2023).

Sebagai awal kegiatan, digelar Bincang Tari bertajuk 'Strategi Berkesenian yang Berkelanjutan' di Eighteen Coffee Jogja

National Museum (JNM) dilanjutkan dengan Temu Media dan Komunitas, Jumat (19/1/2024) mulai pukul 15.00. Pembicara yang tampil Siti Alisa (koreografer), Mila Rosinta, Scholastica W Pribadi (Loka Art Studio), dengan moderator Nia Agustina.

Nia menyebutkan, acara awal ini terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya tapi harus reservasi terlebih dulu. Namun untuk pertunjukan dan bincang karya di Studio Banjarmili yang hadir diharapkan memberikan donasi minimal Rp. 20.000. Donasi ini, tambah Mila, untuk mengajak masyarakat khususnya pencinta seni untuk tidak selalu menikmati pertunjukan dengan cuma-cuma seperti yang banyak disuguhkan di Yogyakarta.

Agenda Sabtu pukul 10.00-15.00 di Studio Banjarmili dilakukan Lokakarya Seni Tata Kelola: 'Merakit Ruang untuk Tumbuh Bersama' dengan pengampu Linda Mayasari dan Maria Renata Rosari (keduanya IDF). Malam harinya pertunjukan menampilkan 'Atandang' karya Sri Cicik Handayani, 'Budi Bermain Boal' (Megatruh Banyu Mili), dan 'Ganda' (Valentina Ambarwati).

Minggu pukul 10.00-12.00 Masterclass: 'Metode Latihan Martinus Miroti' dengan pengampu Agung Gunawan (penari) dan Anter Asmorotedjo (koreografer). Malam hari pertunjukan karya 'Suun' (Putu Aristadewi) dan In Cycle (Siti Alisa). **(Ewp)-f**

RUGIKAN SEKTOR PARIWISATA

PHRI DIY Keberatan Kenaikan Pajak Hiburan

YOGYA (KR) - Kebijakan Pemerintah untuk menaikkan pajak hiburan sebesar 40-75 persen dikeluhkan para pengelola industri pariwisata. Mereka menilai kebijakan tersebut memberatkan dan bisa merugikan industri pariwisata. Karena itu Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menyampaikan keberatan terhadap kebijakan tersebut.

"PHRI DIY jelas merasa keberatan atas kebijakan tersebut. Kami menilai kebijakan itu ngawur, karena tanpa ada sosialisasi maupun dibahas dulu dengan asosiasi-asosiasi terkait, tahu-tahu ada kebijakan seperti itu. Pajak itu idealnya yang wajar, kalau naik 40-75 persen tanggung, 100 persen saja sekalian mematikan kita. Kalau bicara pajak sudah kewajiban kita, tapi yang wajar-wajar saja misalnya 10-20 persen," kata Ketua BPD PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono di Yogyakarta, Rabu (17/1).

Deddy mengatakan, ketentuan soal kenaikan pajak hiburan itu dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Karena akan berdampak terhadap okupansi atau tingkat hunian hotel di DIY. Mengingat persaingan destinasi wisata

dengan negara lain, terutama negara tetangga sangat berat. Misalnya yang terjadi di negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Mereka justru menurunkan pajak untuk menarik wisatawan datang ke negaranya.

Deddy menyatakan, PHRI DIY jelas keberatan dengan kebijakan minimal 40 persen berdasarkan aturan baru dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang merupakan turunan dari Undang Undang Cipta Kerja. "Negara lain pajaknya justru diturunkan untuk menarik wisatawan datang ke negaranya. Mengapa menurunkan pajak? Selain menarik wisatawan juga beban biaya konsumen tidak terlalu tinggi. Itu mengapa saya bilang kebijakan ini ngawur," ungkap Deddy.

Menurut Deddy, kebijakan kenaikan pajak hiburan kontradiksi dengan apa yang disampaikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang ingin mendatangkan wisatawan asing maupun Nusantara. Mengingat wisatawan yang datang butuh hiburan saat datang ke destinasi. **(Ria)-d**

MUHAMMADIYAH TETAPKAN

1 Ramadan 1445 H Jatuh pada 11 Maret 2024

JAKARTA (KR) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal atau tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi jatuh pada Senin Pahing, 11 Maret 2024, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1445 H jatuh pada hari Senin Pahing, 11 Maret 2024 M," demikian bunyi surat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang diterima di Jakarta, Rabu (17/1).

Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas dan Atang Solihin.

PP Muhammadiyah memandang

pada hari Minggu, 29 Syakban 1445 H, bertepatan dengan 10 Maret 2024, ijtimaik menjelang Ramadan 1445 H terjadi pada pukul 16:07:42 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta +00 derajat 56' 28" (hilal sudah wujud).

Pada saat matahari terbenam, Minggu, 10 Maret 2024, di wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk (hilal sudah wujud) kecuali di wilayah Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Selain menentukan 1 Ramadan 1445 H, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan 1 Syawal 1445 H dan 1 Zulhijah 1445 H. Untuk 1 Syawal 1445 H/Idul Fitri 2024, pada hari Senin, 29 Ramadan 1445 H yang

bertepatan dengan 8 April 2024, ijtimaik jelang Syawal 1445 H terjadi pada hari Selasa, 30 Ramadan 1445 H, bertepatan dengan 9 April 2024, pukul 01:23:10 WIB.

Tinggi bulan saat matahari tenggelam tanggal 9 April 2024 di Yogyakarta +06 derajat 08' 28" (hilal sudah wujud), dan di wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. "Di wilayah Indonesia, tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu Pahing, 10 April 2024 Masehi," tulis surat tersebut.

Sementara 1 Zulhijah 1445 Hijriah jatuh pada Sabtu, 8 Juni 2024, Hari Arafah (9 Zulhijah) pada Minggu, 16 Juni 2024, dan Hari Raya Idul Adha pada Senin, 17 Juni 2024. **(Ant)-d**

LPS Bangun Gedung 'Arthadhyaksa' di IKN

PENAJAM PASER

UTARA (KR) - Gedung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dinamai Arthadhyaksa mulai dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ground-breaking pembangunan Kantor Pusat LPS 'Arthadhyaksa' dilakukan Presiden Joko Widodo bersama dimulainya pembangunan sejumlah infrastruktur lainnya di Kawasan IKN, Rabu (17/1).

Presiden berharap pembangunan kompleks perkantoran LPS di IKN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor. Karena kalau LPS sudah memulai, artinya yang lain pasti akan percaya bahwa ibu kota ini akan segera jadi. "Selain itu dapat meningkatkan rasa aman masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Karena LPS segera akan berkan- tor di IKN. Bank Indonesia, juga akan segera ber-

kantor di IKN," katanya.

Ketua Dewan Komisio- ner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pembangunan Kantor Pusat LPS di IKN ini untuk mendukung program pengembangan IKN yang dilakukan Pemerint- ah, serta bentuk nyata dari LPS untuk memberikan rasa aman dan tenang melalui program penjamin- an bagi nasabah perbankan dan asuransi di seluruh pelosok negeri.

"Fungsi utama LPS se-

bagai pelindung masyarakat melalui program penjaminan simpanan perbankan dan penjaminan polis asuransi, turut memberikan inspirasi bagi kami dalam mengembangkan filosofi Kompleks Perkantoran LPS di IKN dengan nama Arthadyaksa. Artha artinya harta atau kekayaan, dan Adhyaksa berarti pelindung, yang bila digabungkan menjadi Arthadhyaksa yang artinya pelindung harta atau pelindung dana nasabah," je-

las Purbaya.

Menurutnya, filosofi ini sangat relevan dengan fungsi utama LPS dan memberikan semangat tersendiri bagi jajaran LPS dalam mendirikan Kantor LPS di IKN, sekaligus menjadi pembangunan perdana Kantor LPS, mengingat dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan bahwa Kantor LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. "Tentunya kami sangat bangga untuk dapat membangun Kantor LPS perdana di Ibu Kota Negara Nusantara," ujar Purbaya.

Menurutnya, pembangunan Gedung LPS dibagi tiga tahap. Tahap pertama ditargetkan rampung akhir 2024. "Sedangkan tahap kedua dan ketiga akan kami selesaikan seiring berkembangnya ekosistem IKN menjadi smart forest city," katanya. **(San)-d**



KR-Dok LPS

Desain Gedung LPS 'Arthadhyaksa' yang mulai dibangun di IKN.